



Analisis Inovasi Pendidikan Inklusif Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Jarik Ma'Siti (Belajar Menarik Bersama Peserta Didik Istimewa)

Fara Fazira Nooraini^{*1}, Bintoro Wardiyanto²

^{1,2} Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: fara.fazira.nooraini-2024@fisip.unair.ac.id, bintoro.wardiyanto@fisip.unair.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-16 Keywords: <i>New Public Service;</i> <i>Inclusive Education;</i> <i>Public Innovation.</i>	This article explores the innovation of the Jarik Ma'Siti program (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa) as a practical implementation of the New Public Service (NPS) paradigm in the context of inclusive education in Indonesia. Developed by SMP Negeri 10 Kota Malang, the program was initiated in response to the increasing number of students with special needs and the lack of special education teachers. By emphasizing participation, collaboration, and human-centered values, Jarik Ma'Siti reflects NPS principles such as citizen-centered service, public interest as the primary goal, and social accountability. This study employs a qualitative literature review method to examine the link between NPS values and the implementation of inclusive education programs at the local level. The findings suggest that NPS provides a relevant conceptual framework for promoting more democratic, inclusive, and justice-oriented public service reform.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-16 Kata kunci: <i>New Public Service;</i> <i>Pendidikan Inklusif;</i> <i>Inovasi Publik.</i>	Artikel ini mengeksplorasi inovasi program Jarik Ma'Siti (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa) sebagai implementasi praktis paradigma <i>New Public Service</i> (NPS) dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia. Dikembangkan oleh SMP Negeri 10 Kota Malang, program ini diinisiasi sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus serta keterbatasan jumlah guru pendidikan khusus. Dengan menekankan partisipasi, kolaborasi, dan nilai-nilai yang berorientasi pada kemanusiaan, Jarik Ma'Siti merefleksikan prinsip-prinsip NPS seperti pelayanan yang berpusat pada warga negara, kepentingan publik sebagai tujuan utama, dan akuntabilitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi literatur untuk mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai NPS dan implementasi program pendidikan inklusif di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa NPS menyediakan kerangka konseptual yang relevan untuk mendorong reformasi pelayanan publik yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan.

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, berbagai tantangan dan peluang terus bermunculan, dan salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah pendekatan pendidikan inklusif. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, diperlukan sistem pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendidikan inklusif, sebagaimana dijelaskan dalam panduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan layanan pendidikan yang memungkinkan anak dengan kebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lain seusianya di sekolah umum (Arriani et al., 2021). Model ini mulai diterapkan sejak tahun 1986 dengan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan. Tujuannya adalah agar anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental tetap memperoleh akses pendidikan dan dapat bersosialisasi secara setara di lingkungan masyarakat. Lebih dari itu,

pendidikan inklusif menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menghapus diskriminasi, dan menjamin hak setiap anak untuk memperoleh kesempatan belajar sesuai potensinya (Hasmyati et al., 2022).

Pada tahap ini, terlihat bahwa gagasan pendidikan inklusif selaras dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang menekankan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, tanpa memandang kondisi awal atau latar belakang mereka. Pendidikan inklusif tidak terbatas pada anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, melainkan mencakup seluruh anak. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif dipahami sebagai sistem layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah umum terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman sebayanya (Sapon-Shevin, 1987). Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menerima semua peserta didik

dalam satu kelas tanpa segregasi. Sekolah ini menyediakan program pembelajaran yang layak dan menantang, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan masing-masing siswa. Dukungan dan bantuan dari guru menjadi elemen penting agar semua anak dapat mencapai keberhasilan belajar (Stainback, 1980).

Berbagai sekolah di Indonesia telah berupaya mewujudkan sekolah yang ramah anak melalui pendekatan inklusif, salah satunya adalah SMP Negeri 10 Kota Malang. Dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sekolah ini mengembangkan inovasi "Jarik Ma'Siti" (Belajar Menarik Bersama Peserta Didik Istimewa), sebagai solusi atas meningkatnya jumlah siswa berkebutuhan khusus yang dalam konteks sekolah ini disebut sebagai "peserta didik istimewa". SMPN 10 Malang merupakan sekolah reguler yang tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK), sementara dari tahun ke tahun jumlah peserta didik istimewa meningkat secara signifikan. Karakteristik kebutuhan khusus yang dihadapi meliputi kategori lambat belajar (*slow learner*), *borderline*, tunagrahita ringan, serta anak-anak dengan potensi cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI). Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam proses pembelajaran, karena guru mengalami kesulitan memberikan layanan yang sesuai. Selain itu, sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai maupun kurikulum yang disesuaikan untuk mendukung kebutuhan belajar peserta didik istimewa. (Auliya et al. 2023). Pada awal tahun 2018, sekolah menghadapi kondisi darurat pembelajaran inklusif, di mana peserta didik istimewa diperlakukan sama dengan peserta didik reguler dalam proses belajar-mengajar. Hal ini berdampak negatif terhadap kenyamanan belajar mereka, menimbulkan tekanan psikologis, perilaku maladaptif, kesulitan akademik, serta rendahnya motivasi belajar. Akibatnya, banyak orang tua menyampaikan keluhan, dan guru pun mengalami hambatan dalam menjalankan pendidikan inklusif karena belum memiliki kompetensi yang memadai di bidang tersebut. (Auliya et al. 2023).

Inovasi Jarik Ma'Siti hadir sebagai upaya untuk menjembatani tercapainya pendidikan yang inklusif, adil, dan merata bagi semua peserta didik. Program ini kemudian berkembang tidak hanya sebagai solusi teknis atas kekurangan sumber daya sekolah, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan,

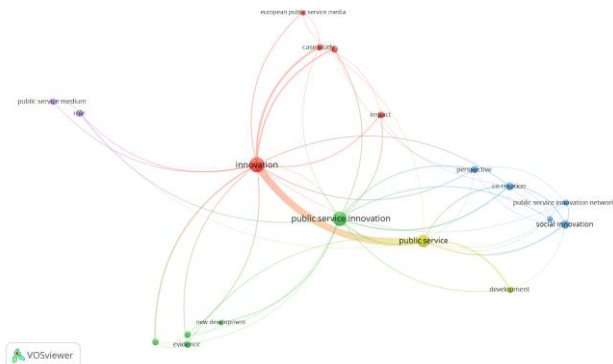
sebagaimana ditekankan dalam paradigma *New Public Service* (NPS). Dalam kerangka NPS, pelayanan publik ditujukan untuk melayani masyarakat, bukan mengendalikan mereka (*serving, not steering*). Jarik Ma'Siti menjadikan peserta didik istimewa sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan, bukan sebagai objek yang diseragamkan. Melalui pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan publik, program ini mencerminkan prinsip NPS seperti akuntabilitas sosial, penghargaan terhadap nilai kemanusiaan, serta pemenuhan hak sebagai warga negara. Keberadaan Jarik Ma'Siti menegaskan bahwa inovasi dalam pelayanan pendidikan harus melampaui efisiensi administratif dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan nyata warga, dalam hal ini peserta didik dengan kebutuhan khusus. Dengan demikian, inovasi ini bukan sekadar praktik teknokratis, melainkan wujud konkret dari pelayanan publik yang demokratis, inklusif, dan bermakna. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana inovasi Jarik Ma'Siti diimplementasikan dalam konteks pendidikan inklusif di SMP Negeri 10 Kota Malang, serta menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip paradigma *New Public Service* tercermin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan dampak program tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik istimewa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review sebagai desain utama. Literature review merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, dokumen kebijakan, serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik, guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu tertentu (Brereton, 2017). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa studi kepustakaan tidak berfokus pada pengembangan teori baru, melainkan bertujuan untuk menjelaskan serta mengelompokkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu (Priharsari, 2022). Fokus kajian ini adalah pada implementasi program pendidikan inklusif Jarik Ma'Siti dan bagaimana keterkaitannya dengan prinsip-prinsip dalam paradigma *New Public Service* (NPS). Literatur yang dikaji dalam penelitian ini mencakup hasil-hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang membahas pendidikan inklusif, pelayanan publik berbasis nilai, serta studi kasus implementasi kebijakan layanan

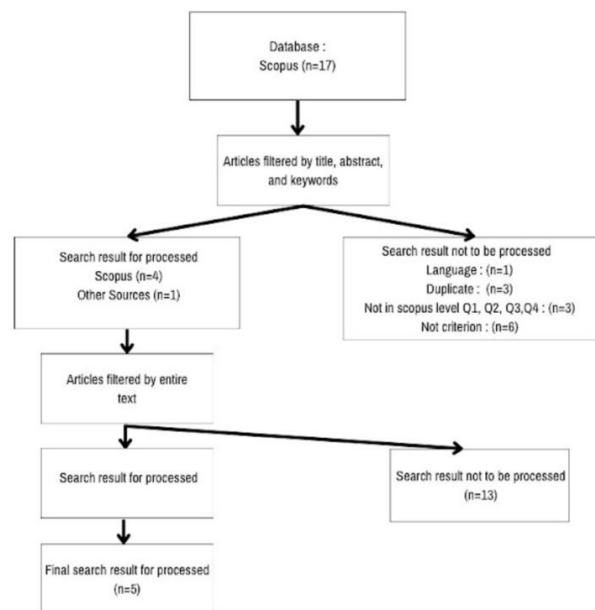
publik yang menekankan partisipasi dan keadilan sosial. Penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Proses pencarian sumber dilakukan melalui mesin pencari seperti Google Scholar, Scopus, Research Gate dan bantuan aplikasi Publish or Perish dan VOSviewer dengan kata kunci seperti *inclusive education*, *Jarik Ma'Siti*, *New Public Service*, *public sector innovation*, dan *citizen centered policy*. Kriteria penyaringan mencakup tahun publikasi (2020–2025), relevansi terhadap topik, serta ketersediaan dokumen artikel dalam format PDF bahasa inggris. Selanjutnya dilakukan ekstraksi data berdasarkan variabel utama, seperti nilai-nilai NPS, strategi implementasi inklusi, tantangan pelaksanaan, dan dampak terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

Proses seleksi dan alur telaah pustaka divisualisasikan dalam diagram PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis*) untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam proses pengumpulan data. PRISMA merupakan evidence based minimum berbasis bukti yang dirancang untuk membantu penulis dalam menyusun laporan tinjauan sistematis dan meta-analisis secara transparan dan menyeluruh. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap jenis penelitian yang dilakukan dilaporkan secara lengkap dan jelas (Sastypratiwi & Nyoto, 2020). Pencarian literatur dilakukan menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan memasukkan API key dari mesin pencari Scopus. Pemilihan Scopus sebagai basis pencarian ditujukan untuk memperoleh sumber-sumber ilmiah yang bereputasi dan terindeks dalam kategori Q1 hingga Q4. Dari proses penelusuran ini, diperoleh sebanyak 17 literatur yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025. Selanjutnya, aplikasi VOS viewer digunakan untuk memetakan dan menganalisis keterkaitan antar kata kunci dalam literatur yang ditemukan seperti pada gambar:



Gambar 1. Hubungan antar kata kunci melalui VOSviewer Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan hasil pencarian diperoleh 17 (tujuh belas) referensi yang judulnya sesuai dengan kriteria kata kunci yang dimasukkan dalam Publish or Perish. Dari tujuh belas artikel tersebut, terdapat 1 (satu) artikel yang menggunakan Bahasa Thailand, sehingga dikeluarkan dalam penelitian. Selain itu terdapat 3 (tiga) duplikasi record dan terdapat 3 (tujuh) artikel yang dikeluarkan karena tidak masuk ke dalam Tier Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian ada 6 (enam) artikel yang dikeluarkan yang tidak memenuhi kriteria artikel jurnal dan 1 (satu) artikel tambahan dari sumber lain. Dengan demikian diperoleh 5 (lima) artikel yang digunakan memenuhi kriteria dari tahun 2020 - 2025.



Sumber: Data diolah penulis, 2025

No	Judul	Penulis (Tahun Terbit)	Tujuan Penelitian	Hasil
1.	<i>Comparison of Achievement in the Implementation of Covid-19 Vaccination in Five Provinces to Establish Herd Immunity in Indonesia in the Perspective of the New Public Service</i>	Asriadi & Dyah, M (2025).	Menganalisis capaian pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di lima provinsi dengan tingkat vaksinasi rendah di Indonesia dalam kerangka pembangunan herd immunity dari perspektif New Public Service (NPS)	Meskipun kelompok tenaga kesehatan telah mencapai target herd immunity, pelaksanaan prinsip-prinsip NPS seperti pelibatan warga, pemberdayaan komunitas, dan pelayanan publik yang partisipatif belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi

				publik dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi secara merata.			(wicked problems), dan kondisi ketidakpastian	kompeten yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman.	
2.	<i>Innovation Labs in the Light of the New Public Service Model</i>	Junior, A. et al (2024)	Mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana laboratorium inovasi (<i>innovation labs</i>) dapat meningkatkan penyediaan layanan publik jika dilihat dari perspektif New Public Service (NPS).	Laboratorium inovasi publik berfungsi sebagai ruang eksperimental yang mengutamakan partisipasi warga, keterbukaan informasi, dan desain layanan yang berpusat pada pengguna. Namun, implementasi konsep ini menghadapi hambatan individual, organisasi, dan kolaboratif yang perlu diatasi agar inovasi dapat berhasil dan berdampak nyata dalam meningkatkan legitimasi dan efisiensi sektor publik.	4.	Weberian Paradigm, New Public Service, and New Public Management: Bureaucracy Assessment	Rohman, A., et al 2025	Mengevaluasi kinerja birokrasi melalui perbandingan tiga paradigma utama administrasi publik: Weberian Paradigm, New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). Tujuan utamanya adalah untuk memahami pengaruh masing-masing paradigma terhadap efektivitas birokrasi, khususnya dalam konteks pemerintahan lokal di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.	paradigma New Public Service (NPS) memiliki pengaruh paling kuat dan positif terhadap kinerja birokrasi, dengan skor rata-rata tertinggi dibandingkan dua paradigma lainnya. NPS unggul karena menekankan pada pelayanan publik berbasis kepentingan masyarakat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan partisipasi warga negara. Meski demikian, Weberian dan NPM masih memiliki peran, meskipun kontribusinya relatif lebih rendah terhadap efektivitas birokrasi.
3.	<i>New Public Service Bargain: Time for Paradigm Shift in Turbulent Times</i>	Johnston, K (2023)	Menelaah kembali perubahan paradigma dalam tata kelola sektor publik, khususnya pergeseran dari <i>Public Administration (PA)</i> ke <i>New Public Management (NPM)</i> , kemudian ke <i>New Public Governance (NPG)</i> , dan menawarkan alternatif baru berupa "New Public Service Bargain". Fokus utamanya mengevaluasi dampak reformasi sektor publik terhadap masalah kebijakan kompleks	Reformasi berbasis NPM dan NPG, meskipun membawa efisiensi, justru melemahkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sektor publik dalam menghadapi krisis jangka panjang. Sebagai respons, penulis mengusulkan paradigma baru yakni New Public Service Bargain, yang menekankan pentingnya membangun kerja bermakna, keseimbangan kerja-hidup, dan pengelolaan talenta di sektor publik untuk menarik dan mempertahankan individu	5.	<i>Collaboration of Stakeholders and AI in The Implementation of New Public Service in The Digital Era</i>	Faruq, M., et al 2025	Mengevaluasi penerapan konsep <i>New Public Service (NPS)</i> dalam manajemen pelayanan publik di era digital, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.	Konsep NPS berpotensi kuat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui nilai-nilai inklusivitas, partisipasi masyarakat, transparansi, serta kolaborasi lintas sektor. Implementasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat memperkuat responsivitas layanan. Namun, tantangan utama berasal dari budaya birokrasi yang masih kaku dan resistensi terhadap perubahan.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dari kelima jurnal yang dikaji, ditemukan bahwa pendekatan *New Public Service* mampu menjawab kelemahan paradigma sebelumnya, dengan menekankan keterlibatan warga, nilai-nilai publik, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam pandangan NPS, birokrasi berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat dan seharusnya tunduk pada kehendak publik selama kehendak tersebut rasional dan sesuai dengan norma serta konstitusi (Supriyadi, 2021). Berbeda dari pendekatan *New Public Management* (NPM) yang menganggap pemimpin birokrasi sebagai entitas ekonomi, NPS memandang pemimpin sebagai sosok yang memiliki dimensi sosial dan politik yang melayani masyarakat (Budiyanto, 2005; Ningtyas, 2017). Beberapa prinsip utama NPS antara lain: melayani warga, bukan sekadar pelanggan; mengedepankan kepentingan publik; menempatkan warga di atas logika wirausaha; bertindak secara demokratis dan strategis; memahami bahwa akuntabilitas bukan sekadar pengawasan tetapi tentang pelayanan; serta menghargai manusia, bukan semata hasil kerja (Meyriyani et al. 2024).

NPS juga memandang masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban publik secara setara. Warga tidak hanya sebagai penerima manfaat layanan, tetapi juga sebagai individu yang wajib memenuhi tanggung jawab seperti menaati hukum, membayar pajak, dan menjaga negara. Karena itu, meskipun ada unsur paksaan dalam relasi antara negara dan warga (misalnya dalam hal kewajiban hukum), aparatur negara harus tetap membangun kepercayaan dan bekerja sama dengan publik secara inklusif (Parulian & Syafri, 2023). NPS menegaskan bahwa aparatur negara bukan satu-satunya pihak yang berhak menentukan apa yang dianggap sebagai kepentingan publik. Sebaliknya, mereka berperan sebagai fasilitator yang membantu warga menyuarkan kepentingan bersama dalam sistem pemerintahan yang mencakup berbagai aktor seperti masyarakat, partai politik, lembaga perwakilan, dan institusi lainnya. Warga memiliki hak untuk terlibat dalam seluruh proses pemerintahan, bukan hanya melalui pemilu. Oleh karena itu, aparatur publik seharusnya menyediakan ruang dialog publik, serta bertanggung jawab

tidak hanya pada hasil ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan (Robinson, 2015).

B. Analisis *New Public Service* Pada Jarik Ma'Siti

Paradigma *New Public Service* (NPS) yang dikembangkan oleh Denhardt (2000, 2003) menempatkan masyarakat sebagai subjek pelayanan publik, bukan sekadar objek atau pelanggan. Terdapat tujuh prinsip kunci NPS (Denhardt, 2003) yang sesuai dengan implementasi program Jarik Ma'Siti, diantaranya:

Serve, rather than steer; Peran pemerintah atau birokrasi bukan untuk mengendalikan masyarakat, tetapi untuk melayani dan memberdayakan mereka agar mampu memenuhi kebutuhan bersama. Dalam pendekatan program Jarik Ma'Siti, di mana sekolah tidak memaksakan standar seragam kepada semua siswa, melainkan merancang pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik siswa berkebutuhan khusus. Pendekatan ini berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan dari regulasi teknis semata.

The public interest is the aim; NPS menekankan bahwa kebijakan publik harus bertujuan membangun kepentingan publik yang kolektif, bukan sekadar mengejar indikator kinerja administratif. Jarik Ma'Siti dibangun atas dasar prinsip keadilan akses pendidikan, di mana setiap anak terlepas dari keterbatasannya berhak mendapatkan pembelajaran yang layak dan bermartabat. Program ini tidak mengejar target nilai akademik sebagai satu-satunya ukuran, tetapi lebih pada pencapaian kebermaknaan belajar dan kesejahteraan psikologis siswa.

Think strategically, act democratically; NPS mendorong kebijakan yang dirancang secara strategis dan dilaksanakan secara demokratis. Dalam konteks Jarik Ma'Siti, inovasi ini bukan keputusan sepihak kepala sekolah, melainkan hasil dari kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas. Proses asesmen kebutuhan siswa dilakukan dengan melibatkan keluarga, serta mempertimbangkan kondisi sosial-emosional siswa. Ini mencerminkan praktik deliberasi dan musyawarah, bukan pendekatan satu arah

Serve citizens, not customers; Konsep ini menjadi pembeda utama antara NPS dan NPM. Dalam NPM, masyarakat adalah konsumen yang puas atau tidak puas atas layanan. Dalam

NPS, masyarakat adalah mitra aktif dalam pelayanan. Jarik Ma'Siti tidak memandang orang tua peserta didik istimewa sebagai pihak yang pasif, tetapi melibatkan mereka dalam perencanaan pendidikan, asesmen kemajuan siswa, dan refleksi atas kebijakan sekolah. Proses ini memperkuat hubungan sosial yang bersifat timbal balik.

Accountability isn't; simple Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada atasan atau laporan kinerja, tetapi juga kepada nilai-nilai etis dan aspirasi publik. Implementasi Jarik Ma'Siti mempertanggungjawabkan keberhasilannya bukan hanya dalam bentuk angka atau sertifikat penghargaan, tetapi juga dalam bentuk kepuasan dan perkembangan peserta didik istimewa, serta pengakuan dari komunitas pendidikan dan masyarakat.

Value people, not just productivity; NPS menghargai pegawai dan warga negara sebagai manusia seutuhnya, bukan alat untuk mencapai target. Guru dalam program Jarik Ma'Siti tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk membangun empati, memahami kebutuhan siswa, dan menjadi fasilitator belajar yang inklusif. Ini sangat selaras dengan prinsip prinsip humanis dalam NPS, yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat individu.

Value citizenship and public service above entrepreneurship; Jarik Ma'Siti juga mendukung tujuan jangka panjang NPS, yaitu membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat. Dengan keberhasilan menciptakan pendidikan inklusif yang layak dan kolaboratif, program ini meningkatkan legitimasi sekolah sebagai institusi publik yang mampu melayani semua warga, termasuk kelompok marginal. Secara keseluruhan, program Jarik Ma'Siti adalah representasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip *New Public Service* di tingkat lokal. Ia menunjukkan bahwa pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dapat lebih bermakna dan berdampak jika dilaksanakan dengan dasar nilai, kolaborasi, partisipasi, dan penghargaan terhadap martabat manusia. NPS memberi kerangka normatif dan operasional untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efisien, tetapi juga adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan warga negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi Jarik Ma'Siti merupakan bentuk nyata implementasi paradigma *New Public Service* (NPS) dalam konteks pendidikan inklusif di tingkat lokal. Program ini tidak hanya menjawab tantangan teknis akibat keterbatasan sumber daya dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga merepresentasikan pelayanan publik yang berorientasi pada nilai, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, paradigma NPS memberikan kerangka yang relevan dan aplikatif dalam menciptakan layanan publik yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga bermakna secara sosial dan manusiawi. Inovasi seperti Jarik Ma'Siti membuktikan bahwa reformasi pelayanan publik yang berbasis nilai dan kolaborasi dapat diterapkan secara efektif bahkan di lingkup paling dasar pemerintahan yakni sekolah.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Inovasi Pendidikan Inklusif Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Jarik Ma'Siti (Belajar Menarik Bersama Peserta Didik Istimewa).

DAFTAR RUJUKAN

- Arriani, F., Agustawati, Rizki, A., Ranti, W., Wibowo, S., Tulalessy, C., & Herawati, F. (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. In Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Asriadi, Mutiarin, D. (2023). Comparison of Achievements in the Implementation of COVID-19 Vaccination in Five Provinces to Establish Herd Immunity in Indonesia in the Perspective of the New Public Service. Vol. 36 No. 5. DOI: 10.1089/vim.2022.0136
- Auliya, Navisa., Karima, rizka., Azizah, Nofa., Handayani, Puspita., Hikmah, Raudatul., Hanafi, Yusuf. (2023). Transformasi Pendidikan Ramah Anak Melalui Inovasi Jarik Ma'Siti: Studi Kasus di SMPN 10 Malang. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pendidikan. doi: 10.17977/um066.v3.i6.2023.4

- Breenton, P., Kitchenham, B., Budgen, D., Turner, M., Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. *J Syst Softw.* DOI: 10.1016/j.jss.2006.07.009
- Denhardt, JV., dan Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering.* London, England: M.E. Sharpe
- Denhardt, JV., dan Robert B. Denhardt. 2007. *The New Public Service: Serving Not Steering (Expanded Edition).* New York: M.E.Sharpe, Armonk.
- Hasmyati. et al. (2022). Pendidikan Inklusif [Inclusive Education] (M. P. Ariyanto (ed.); I). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sapon-Shevin, M. (1987). The national education reports and special education: Implications for students. *Exceptional Children*, 53(4), 300-306.
- Johnston, K. (2023). *New Public Service Bargain: Time for Paradigm Shift in Turbulent Times?*. DOI: 10.24193/tras.SI2023.5
- Junior, A., Emmendoefer, M. (2024). *Innovation Labs in the Light of the New Public Service Model.* . <https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMC240079>
- Meyriyani, S., Sujana, N., Utami, P. (2024). Penerapan Prinsip New Public Service (NPS) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*
- Ningtyas, T. (2017) 'New Public Service: Pelayanan Publik Berbasis Humanistik untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi', *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(1). DOI:10.25139/jmnegara.v1i1.283
- Parulian, M., and Syafri, W. (2023) 'Application of the New Public Service (NPS) principles in population administration services in Tangerang Regency', *Russian Law Journal*, 11(13), pp. 281-286. Available at: <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/2616> (accessed 07 February 2025)
- Priharsari, D. (2022). Systematic Literature Review di Bidang Sistem Informasi dan Ilmu Komputer. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(2), 263-268. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202293884>
- Robinson, P.K. (2015) *Enzymes: Principles and Biotechnological Applications. Essays in Biochemistry*, 59, 1-41. <https://doi.org/10.1042/bse0590001>
- Rohman, A., Suprojo, A., Sasmito, C., Wulandari, R. (2025). *Weberian Paradigm, New Public Service, and New Public Management: Bureaucracy Assessment.* DOI:10.17323/1999-5431-2025-0-5-52-70
- Sapon-Shevin, Mara., (1987). Giftedness as a Social Construct, Vol. 89, No. 1. <https://doi.org/10.1177/016146818708900105>
- Sastypratiwi, H., & Nyoto, R. D. (2020). Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review. 6(2), 250-257.
- Stainback, S., & Stainback, W. (1980). Some trends in the education of children labelled behaviorally disordered. *Behavioral Disorders*, 5(4), 240-249
- Supriyadi (2021) *Evaluasi Pendidikan.* Penerbit NEM. ISBN 6236293147, 9786236293140